

PROBLEMATIKA PEREMPUAN BEKERJA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PERHOTELAN)

Endang Sutrisna¹

ABSTRACT

Many women workers engaged in various activities in the tourism sector, but gender issues are always attached to them which limit womens' activities in the public domain such as various forms of marginalization, discrimination, and subordination that was reflected in the inequality of wages or salaries. Dual role for women workers into a dilemma, on one hand they are as housewives who have excellent troubleshooting and households, on the other hand they must be professional in a career.

Keywords: *women worker, tourism sector, marginalization, discrimination, subordination.*

ABSTRAK

Pekerja perempuan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan pada sektor pariwisata, tetapi berbagai permasalahan gender selalu menyertainya yang membatasi aktivitas kaum perempuan di ranah publik seperti berbagai bentuk marjinalisasi, diskriminasi, dan subordinasi yang tercermin pada kesenjangan upah dan gaji. Peran ganda bagi pekerja perempuan menjadi dilematis, disatu sisi mereka sebagai ibu rumah tangga yang harus piawai mengatasi masalah rumah tangga dan di sisi lain mereka harus profesional dalam berkarier.

Kata kunci: Pekerja perempuan, sektor pariwisata, marginalisasi, diskriminasi, subordinasi.

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293. Telp. 0761-63277

PENDAHULUAN

Dunia pariwisata Indonesia sudah memperlihatkan perkembangan dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja baik untuk pria maupun perempuan. Banyaknya keikutsertaan perempuan yang bekerja di sektor pariwisata, terutama di dunia perhotelan sangatlah pesat. Pekerja perempuan yang terjun di dunia industri jasa perhotelan, ada yang masih lajang maupun ada yang sudah menikah. Peran ganda bagi perempuan yang sudah menikah dan bekerja di dunia perhotelan mempunyai problematika tersendiri, dimana mereka bekerja juga harus merawat keluarga.

Mengkaji perempuan bekerja tentu terkait dengan persoalan penyetaraan gender. Dalam pengertian ilmu sosial, istilah gender diartikan sebagai pola hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada ciri-ciri sosial masing-masing. Tercakup di dalamnya pembagian kerja, pola relasi kuasa perilaku, dan persepsi yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Sebagai pranata sosial gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal dalam artian berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dan dari waktu ke waktu lainnya, sehingga dalam pengertian tersebut gender sesungguhnya lebih berkaitan dengan sistem sosial masyarakat dan jauh lebih luas dari sekedar isu perempuan saja (Hafidz, 1995).

Demikian juga Fakih (1996) menyatakan gender adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan melalui

proses sosial dan budaya yang berkesinambungan.

Dapat ditegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain yang biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan budaya atau kultural. Oleh karenanya gender berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas masyarakat, sementara jenis kelamin tidak berubah.

Secara teoritis peningkatan peran wanita sudah banyak mencapai hasil dan kemajuan. Akan tetapi pengakuan tersebut masih bersifat umum, pengakuan yang bersifat khusus terhadap berbagai kelompok wanita masih belum terlihat (Iqbal, 1994). Pengakuan yang tidak simpatik terhadap kaum perempuan, yaitu masih adanya anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Jika anggapan ini benar dan terus berlaku di masyarakat konsekuensinya perempuan akan selalu dinomorduakan setelah laki-laki. Berarti yang baik-baik selalu diperoleh lebih dahulu oleh laki-laki baru setelah itu perempuan. Secara moral anggapan tersebut tidak benar karena perempuan juga manusia seperti laki-laki.

Kini perempuan Indonesia banyak yang mengalami kemajuan, tidak hanya di tingkat rumah tangga, tetapi jauh di luar itu mereka berperan sebagai pengambil keputusan. Beberapa posisi strategis yang diduduki oleh perempuan Indonesia seperti presiden, menteri, anggota parlemen, public relation manager, front office manager, human relation director dan masih banyak lagi jabatan publik lainnya. Tenaga kerja perempuan cukup banyak juga yang terjun ke dunia pendidikan, mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar baik sebagai guru, dosen maupun rektor. Bahkan jika ditinjau secara menyeluruh ternyata pekerja perempuan banyak juga sebagai pekerja yang digolongkan keras, dimana mereka bekerja sebagai supir, tukang bangunan, bengkel alat-alat berat dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Tidak dapat disangkal lagi kehadiran kaum perempuan dalam dunia kerja perhotelan besar manfaatnya, untuk sebagian perempuan mereka menyandang posisi atau peran ganda. Disatu sisi mereka sebagai ibu rumah tangga atau sebagai partner kaum laki-laki dalam berumah tangga dan di sisi lain sebagai seorang pekerja yang membantu mencari nafkah. Bagaimanapun mereka juga adalah ibu rumah tangga yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga, oleh karenanya dalam meniti karier perempuan mempunyai beban dan hambatan lebih berat dibanding rekan prianya. Berarti kaum perempuan harus lebih dulu mengatasi urusan rumah tangganya, mengurus suami, menjaga dan mendidik anak-anaknya dan hal-hal lain yang menyangkut urusan rumah tangga.

Dengan demikian terkadang muncul berbagai persoalan seperti bagaimana perempuan bekerja sesuai kodratnya, terlindungi dari pelecehan seksual, perlindungan bagi mereka yang bekerja malam hari, terutama sekali di dunia perhotelan dimana pekerja perempuan yang bekerja dalam operasional hotel yaitu mereka yang bekerja di bagian front office, housekeeping, restaurant, cashier dimana mereka mempunyai jadwal kerja sampai larut malam bahkan sampai pagi hari serta perlindungan sampai mereka tiba di rumah dengan aman dan selamat. Pada era sekarang ini karena ilmu dan teknologi berkembang pesat, hampir tidak ada sekat pemilihan profesi antara laki-laki maupun perempuan sehingga timbul istilah apa yang disebut wanita kareir (E.T. Suryadi, 1989).

Dilema pekerja perempuan sektor perhotelan timbul karena peranan dan fungsinya. Berdasarkan Panca Dharma Wanita Indonesia yang menuntut wanita Indonesia dapat melakukan 5 fungsinya antara lain sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, penerus keturunan, ibu dari anak-anak, dan sebagai

warga negara. Dengan kondisi tersebut memang berat fungsi wanita sepertinya tidak mungkin semuanya berjalan dengan baik dan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal.

Keterkaitan problematika perempuan pekerja dengan salah satu Panca Dharma dapat diungkapkan bahwa keberadaan perempuan bekerja sering menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mereka, antara lain menyangkut izin tidak masuk kerja karena urusan rumah tangganya seperti anak yang sakit, pembagian raport anak di sekolah, urusan cuti haid, hamil, melahirkan dan lain sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana menempatkan perempuan pada kedudukannya yang wajar, sebagai tenaga kerja yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

Indonesia sesungguhnya telah menempatkan posisi perempuan pada level yang sejajar dengan laki-laki, terutama dalam masalah ketenagakerjaan, karena disadari atau tidak perempuan mempunyai peran ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Bila melihat fenomena yang berkembang saat ini masalah ketenagakerjaan wanita terlihat ada berbagai kesenjangan walaupun undang-undang ketenagakerjaan telah menjamin segala hak dan kewajibannya. Masih banyak perusahaan yang mempekerjakan perempuan di luar peraturan yang ada. Mereka masih diperlakukan tidak adil dan hak-haknya sebagai pekerja dilanggar seperti terjadi diskriminasi, bahkan sampai kepada pelecehan seksual. Ironisnya kenyataan seperti itu jarang sekali terungkap sehingga memberi peluang kepada pihak pengusaha untuk terus mempekerjakan perempuan meski masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh

lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan yang rendah serta dengan imbalan (upah/ gaji) yang rendah pula. Pekerjaan perempuan selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (domestik). Walaupun para perempuan mulai menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan tersebut merupakan perpanjangan dari pekerjaan rumah tangga misalnya bidan, juru rawat, guru, sekretaris dan pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Begitu pula mengenai upah dan gaji sudah menjadi rahasia umum jika upah pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.

Meskipun prospek pekerja perempuan cukup baik dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih cepat dari angkatan kerja laki-laki, namun tuntutan persamaan hak atas perolehan upah atau gaji dengan laki-laki belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh selain sumberdaya pekerja perempuan masih rendah juga disebabkan oleh absentisme dan pemutusan hubungan kerja di kalangan pekerja perempuan cukup tinggi. Akibatnya pihak perusahaan enggan menginvestasikan sumberdaya mereka untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja perempuan.

Sementara pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari selama ini masih mengalami berbagai kendala yang dapat diartikan bahwa kaum perempuan belum saatnya untuk mandiri secara total. Misalnya pekerja perempuan tidak bisa bekerja dalam kondisi sedang hamil, harus mendapat ijin dari suami, keluarga dan perusahaan harus menyediakan angkutan antar jemput. Di dalam keluarga biasanya laki-laki mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan perempuan. Hal ini sangat jelas pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Orang tua cenderung memilih anak laki-laki untuk melanjutkan studi daripada anak perempuan sehingga pada akhirnya akan berdampak kepada perbedaan pengetahuan dan kemampuan (Sumanto, 1993).

Kaum perempuan mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, di sektor publikpun perempuan mengalami hal yang sama. Sangat jarang pada masyarakat industri yang perempuannya secara ekonomis setara dengan laki-laki, karena era industrialisasi sangat kental dengan bias jender berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sistem ekonomi industri kapitalis mengutamakan pertumbuhan dan mendorong konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima perempuan dibanding laki-laki. Kesenjangan tersebut dapat dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja dan lapangan pekerjaan. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan maka semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap laki-laki. Pada tingkat pendidikan dasar tingkat kesenjangan lebih dari 100% (upah Rp.27.000,- untuk perempuan dan Rp.55.000,- untuk laki-laki). Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan kesenjangan akan semakin kecil. Untuk jam kerja per minggu kesenjangan berkisar 30% artinya perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama dengan laki-laki perminggunya menerima upah 30% lebih rendah (Hafidz, 1995).

Secara umum dapat diungkapkan bahwa perempuan Indonesia sudah mencapai kemajuan yang nyata dalam pendidikan, kesempatan kerja dan keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Namun, jika diamati lebih mendalam akan dijumpai kenyataan bahwa kesempatan yang diperoleh perempuan masih tertinggal dibanding dengan laki-laki. Di bidang pendidikan, pada tahun 2005 persentase perempuan yang buta huruf sudah berkurang dibanding keadaan tahun 2000, namun persentase perempuan Indonesia yang masih buta huruf (18,31%) dibandingkan dengan kaum laki-laki (9,39%) masih jauh lebih tinggi keadaan tahun 2005. Hal yang sama juga dalam pencapaian pendidikan,

angka pencapaian pendidikan perempuan cenderung terkonsentrasi pada tingkat pendidikan dasar (Biro Pusat Statistik, 2007).

Tingkat pendidikan yang sama antara perempuan dan laki-laki tidak menjamin upah atau gaji yang setara dalam kondisi pekerjaan. Untuk tingkat pendidikan SLTA upah yang diterima perempuan Rp. 601.194,00 per bulan lebih rendah daripada pekerja laki-laki Rp. 734.732,00 per bulan (Notosusanto, 106 : 2004). Di dunia kerja masih ada berbagai praktek yang merugikan kesempatan perempuan untuk berkecimpung pada kesempatan lapangan pekerjaan, seperti diskriminasi dalam rekrutmen, pelecehan seksual dan diskriminasi dalam kenaikan maupun promosi jabatan. Sering terjadi diberbagai perusahaan menggunakan kriteria jenis kelamin yang membatasi kesempatan perempuan untuk menduduki posisi-posisi jabatan tertentu.

Angka-angka tersebut mengisyaratkan bahwa di dalam masyarakat yang diwarnai oleh emansipasi yang sudah maju sekalipun, karakteristik pekerjaan perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh faktor yang sama. Berbagai jenis pekerjaan dianggap cocok dengan karakteristik perempuan contohnya seperti pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Keterbatasan peluang kerja perempuan berkaitan erat dengan modal yang dimiliki oleh tenaga kerja perempuan yang secara umum dapat dikatakan *human capital* perempuan yang meliputi pendidikan, latihan dan pengalaman relatif masih rendah. Kondisi seperti itu juga dirasakan oleh tenaga kerja

perempuan di sektor pariwisata dalam hal ini kasus perhotelan yang selalu dihadapkan pada persoalan dilematis peran ganda antara keluarga dan profesi.

PENUTUP

Sektor pariwisata telah mampu menciptakan kesempatan kerja melalui berbagai jenis usaha yang terkait dengan kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun pekerja perempuan sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor pariwisata tetapi berbagai permasalahan gender selalu menyertainya yang membatasi perempuan di ranah publik seperti berbagai bentuk marginalisasi diskriminasi dan subordinasi yang tercermin pada kesenjangan upah atau gaji, terkonsentrasinya pekerja perempuan pada jenis-jenis pekerjaan secara manual yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

Potensi perempuan sebagai bagian dalam menunjang pembangunan nasional tidak dapat disangkal lagi, terutama sektor pariwisata yang salah satunya adalah industri jasa perhotelan semakin banyak diminati oleh pekerja perempuan, karena dunia kerja perhotelan menuntut adanya suatu sikap keramah-tamahan yang biasanya dimiliki pekerja perempuan secara alamiah.

Peran ganda bagi pekerja perempuan yang sudah menikah menjadi dilematis, di satu sisi mereka sebagai ibu rumah tangga yang harus piawai mengatasi urusan rumah tangganya dan di sisi lain mereka harus profesional dalam meniti karier.

DAFTAR PUSTAKA

- Anolaga, Pandji. 1992. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Biro Pusat Statistik. 2007. *Hasil Sensus Penduduk 2005*. Jakarta.
- Fakih, Mansour. 1996. *Gender sebagai Alat Analisis Sosial*. Jakarta.
- Hafidz, Wardah. 1995. *Pola Relasi Gender dan Permasalahannya*. Yogyakarta.
- Iqbal, Mohammad. 1994. *Wanita Kepala Rumah Tangga dan Kemiskinan*. Jakarta.
- Notosusanto, Smit. 1994. *Penghapusan Diskriminasi Perempuan*. Jakarta.
- Sumanto, Ali. 1993. *Nasib Pekerja Wanita di Bawah Pria*. Bali.
- Suryadi, Endang T. 1989. *Wanita Karier dan Dilemanya*. Jakarta: Gramedia.